

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Terwujudnya demokrasi yang merata adalah bentuk keadilan bagi rakyat, salah satu cara atau wujud konkret dari hal tersebut adalah dengan pemilihan umum yang jujur dan adil. Dilakukannya pemilu maka dari situlah akan terpilih orang-orang yang akan menjadi wakil rakyat dalam pemerintahan baik daerah maupun nasional. Pemilu dapat dikatakan sebagai proses penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.¹ Oleh karena itu, dalam pemilu semua partai politik dapat berkompetisi dalam mengusung wakil rakyat jika telah memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu. Peserta pemilu adalah partai politik. Partai politik dapat dikatakan sebagai sebuah kendaraan yang berfungsi untuk menyatukan orang-orang yang mempunyai kesamaan visi dan misi dalam penyelenggaraan negara.

Partai politik adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk memperjuangkan ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaannya dalam pemilihan umum.² Lahirnya partai politik karena adanya keinginan serta kebutuhan pemerintah untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam membuat suatu kebijakan dan peraturan. Jika sebagai lembaga perwakilan, parlemen turun langsung ke masyarakat dalam menjangkau aspirasi masyarakat, maka efektivitas parlemen kurang terjamin. Oleh karena itu, perlu suatu organisasi politik yang akan membantu pemerintah dalam memenuhi keinginan masyarakat dan

¹ Ramlan A.Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta:Gramedia widiasarana Indonesia, 1992, hlm.181.

² Sigit Pamungkas, Partai Politik, teori dan praktik di Indonesia, Yogyakarta:IDW, 2012, hal.5.

kebutuhan masyarakat. Dengan adanya partai politik masyarakat dapat melihat visi dan misi yang dianggap baik dari partai tersebut. Partai-partai yang muncul tentu mempunyai tujuan tersendiri untuk partai dan masyarakat. Namun, tidak semua partai dipandang baik oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena tidak sedikit kader partai politik setelah duduk di legislatif maupun eksekutif terjerat kasus korupsi maupun kasus lainnya, hal tersebut yang membuat masyarakat kecewa terhadap wakil rakyat. Kekecewaan tersebut menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Keinginan masyarakat terhadap wakil rakyat adalah agar melakukan perbaikan terhadap daerah dan masyarakat secara umum, ketika masyarakat sudah tidak percaya kepada wakil rakyat, maka sifat tidak acuh dari masyarakat akan timbul, yaitu malas untuk berpartisipasi dalam pemilu, salah satunya ikut mencoblos.

Kepercayaan masyarakat terhadap partai politik menjadi hal menarik untuk diketahui, karena tidak semua orang dapat mempercayai partai dan hanya orang-orang yang memiliki keinginan saja yang percaya dan bergabung dalam partai. Ketika keinginan tersebut sudah tercapai apalagi sudah terpilih menjadi wakil rakyat namun lupa dengan visi dan misinya, inilah yang menimbulkan kekecewaan masyarakat sehingga tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Banyak kasus seperti korupsi dan lainnya yang menjerat para wakil rakyat sehingga menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat, namun permasalahan itu kembali kepada partai politik sebagai kendaraan yang mengantarkan wakil rakyat tersebut sebagai wakil rakyat.

Beberapa orang telah melakukan survei tentang kepercayaan masyarakat terhadap partai politik di seluruh Indonesia. Memang partai politik mendapat

urutan terendah dalam tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Hasil survey oleh SMRC pada bulan Desember 2015 lalu, dengan responden sebanyak 1.220 orang dipilih secara random dari seluruh warga Indonesia yang berusia di atas 17 tahun. Suvei tersebut menyatakan,

“Sementara itu, DPR dan partai politik menempati posisi paling bawah dalam kategori kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. DPR memperoleh presentase sebanyak 58,4 %, sementara parpol 52,9 %”.³

Sementara itu, Tim Riset ICW, Febri Hendri menyatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik di Povinsi Riau sangat rendah yakni 37 persen. Hasil tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan oleh *Polling Center* bersama dengan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau.⁴

Kemudian hasil temuan Anton Yuliono mengatakan, faktor rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik karena bentuk dari kejenuhan masyarakat sehingga tidak hadir dalam memilih. Kekecewaan yang begitu besar disebabkan oleh hal-hal kecil yang terulang-ulang setiap pemilu. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada partai politik masyarakat Surabaya tercermin pada partisipasi memilih masyarakat yang rendah serta faktor tingginya tingkat korupsi para aktor-aktor politik, sosial ekonomi dan sikap apatis masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah tingkat provinsi maupun tingkat kota.⁵

³ Embranie Nadia Kemala Movanita, Survei: Tingkat kepercayaan pada TNI paling tinggi dan parpol paling rendah, Kompas.com, diakses dari www.kompas.com. Pada tanggal 2 oktober 2017 pukul 08.48

⁴ <http://pekanbaru.tribunnews.com> diakses pada tanggal 11/11/2017 pukul 07.14 WIB

⁵ Anton Yuliono, Kepercayaan Masyarakat Pada Partai Politik (Studi Kasus Kecendrungan Golongan Putih Pada Pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Surabaya), *Jurnal DIA Administrasi Publik*, Vol.11, No. 1, Hal. 173-184 Juni 2013

Fenomena umum kepercayaan masyarakat tersebut juga terdapat di Kota Padang, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan politisi yang menyebabkan turunnya partisipasi pemilih. Masyarakat mulai jenuh dengan janji-janji yang diucapkan saat kampanye yang tidak dipenuhi ketika sudah menduduki jabatan. Dalam sosialisasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang diadakan oleh KPU Kota Padang, pengamat politik dari UNP, Eka Vidya mengatakan;

“ Masyarakat mulai jenuh, apalagi dengan banyaknya janji-janji ketika kampanye yang tidak dipenuhi ketika menjabat, ... Mau atau tidaknya masyarakat ikut pemilu tergantung kepercayaan mereka terhadap orang-orang yang akan dipilihnya.”⁶

Berdasarkan pemberitaan di berbagai media, terkait kepercayaan masyarakat pada partai politik yang sangat rendah dibandingkan dengan lembaga lainnya, menjadi dasar bagi peneliti untuk meneliti tingkat kepercayaan masyarakat pada partai politik, bukan hanya satu partai yang kadernya banyak terlibat kasus korupsi, melainkan ada beberapa partai seperti, pada tahun 2012 kader Partai Golkar paling banyak terjerat kasus korupsi (13 kader), yang disusul Partai Demokrat dengan sembilan kader dan PDI-P dengan tujuh kader. Kepala daerah dan DPRD tidak luput menjadi aktor daerah yang akhirnya ditangkap KPK karena melakukan upaya kerjasama melakukan korupsi.⁷ Tidak hanya itu, indeks korupsi partai politik sepanjang tahun 2002-2014 yang diolah dari ICW menyatakan bahwa PDIP (84 kasus), Golkar (60 kasus), PAN (36 kasus), Demokrat (30 kasus), PPP (13 kasus), PKB (12 kasus), Partai Hanura (6 Kasus),

⁶ <http://antaranews.com> diakses pada tanggal 01/03/2018 pukul 17.28 WIB

⁷ Lihat Laporan akhir tahun ICW 2012.

Partai Gerindra (3 kasus).⁸ Ditambah lagi dengan kasus korupsi terbaru yang sangat marak diperbincangkan sampai detik ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh partai politik kadernya terjerat kasus korupsi. Sehingga peneliti memfokuskan pada pengaruh tingkat kepercayaan masyarakat pada partai politik terhadap partisipasi politik masyarakat Sumatera Barat, khususnya masyarakat Kota Padang pada pemilihan umum legislatif tahun 2014, sehingga dari hasil tingkat partisipasi politik peneliti dapat memecahkan masalah tentang pengaruh tingkat kepercayaan masyarakat pada partai politik terhadap partisipasi politik dalam pemilihan umum legislatif 2014. Berikut rekapitulasi perolehan suara pada pemilihan legislatif tahun 2014 Kota Padang.

Table 1.1
Hasil Hitung TPS(Form DA1) Kota Padang
Rekapitulasi Data Pemilu Legislatif Tahun 2014

No	Kecamatan	Pemilih	Pengguna hak pilih	Suara sah	Suara tidak sah	Total suara	%
1	Bungus Teluk Kabung	19.037	11.367	11.008	359	11.367	59,71
2	Padang Selatan	45.196	26.757	25.817	940	26.757	59,20
3	Lubuk Begalung	82.080	46.868	44.975	1.893	46.868	57,10
4	Pauh	41.738	23.744	22.772	972	23.744	56,89
5	Koto tengah	131.957	72.200	69.378	2.822	72.200	54,71
6	Lubuk Kilangan	37.271	20.337	19.605	732	20.337	54,57
7	Nanggalo	44.643	23.655	22.585	1.070	23.655	52,99
8	Padang Utara	44.002	22.504	21.518	986	22.504	51,14
9	Padang Barat	36.905	18.773	17.891	882	18.773	50,87
10	Kuranji	108.116	53.714	51.624	2.090	53.714	49,68
11	Padang Timur	65.444	32.255	30.883	1.372	32.255	49,29

Sumber: kpu.go.id

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat disimpulkan bahwa, pada pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Padang terlihat partisipasi memilih dari seluruh

⁸ Lihat Laporan Akhir Tinjauan Peran Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia, Direktorat Politik Dan Komunikasi Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun 2016

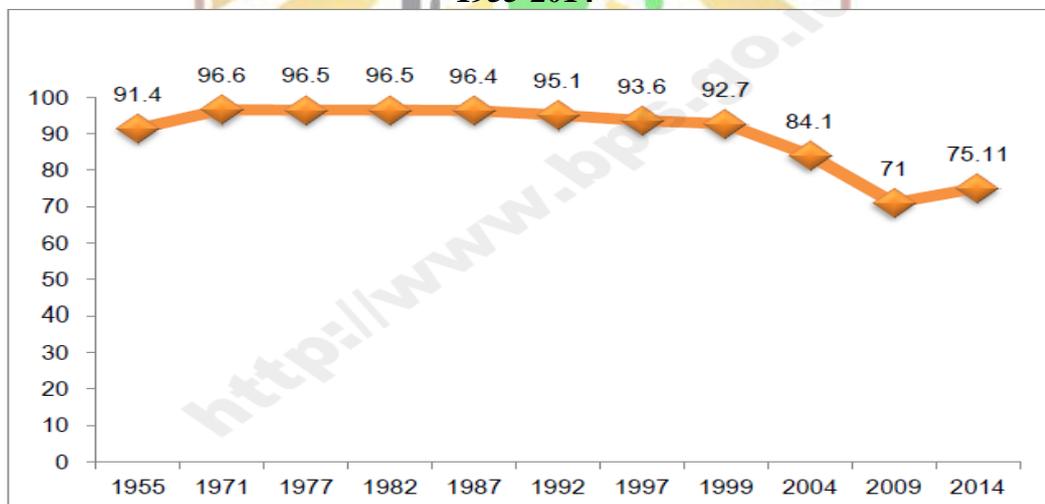
pemilih di setiap kecamatan. Kurangnya partisipasi bisa menjadikan gambaran terhadap kepercayaan masyarakat berkurang, sehingga secara sukarela tidak mau terlibat. Sebagai definisi umum, partisipasi adalah suatu kegiatan keikutsertaan dalam suatu masyarakat maupun lainnya. Berkaitan dengan definisi tersebut, Herbert McClosky mendefinisikan partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan dari warga masyarakat secara sukarela melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum, namun Norman H.Nie dan Sidney Verba (1998) seperti dikutip oleh Miriam Budiardjo mendefinisikan partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal atau diselenggarakan secara langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.⁹

Keikutsertaan masyarakat dalam pemilu merupakan bentuk dari partisipasi politik, namun dapat dilihat dari Tabel 1.1 di atas bahwa, tidak menjamin dengan jumlah pemilih terbanyak di suatu daerah juga memperoleh suara tertinggi, akan tetapi justru daerah yang memiliki jumlah pemilih paling sedikit yang memperoleh suara tertinggi. Terlihat dari tabel di atas bahwa Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan jumlah pemilih 19.037 pemilih memperoleh suara tertinggi yaitu 59,71%. Sedangkan di Kecamatan Padang Timur dan Kecamatan Kuranji memperoleh suara paling sedikit yaitu 49,29 % dan 49,68% dengan jumlah pemilih sebanyak 65.444 di Kecamatan Padang Timur dan 108.116 di Kecamatan Kuranji dari hasil perhitungan suara pada pemilu 2014 di Kota Padang.

⁹ Lihat Miriam Budiardjo, Partisipasi dan Partai Politik :Sebuah Bunga Rampai, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,1998, hlm.2.

Dilihat dari seluruh wilayah pemilihan di Indonesia, tingkat partisipasi masyarakat selalu terjadi penurunan dari waktu ke waktu, begitupun di Sumatera Barat, mengingat pada pemilu tahun 2009 tingkat partisipasi masyarakat menurun. Penurunan yang sangat drastis terjadi pada pemilu terakhir tahun 2009 dan pilkada 2010 yang disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor berpengaruh kuat adalah terbentuknya sikap sinisme masyarakat sebagai akibat kekecewaan mereka terhadap perilaku pemimpin yang mereka pilih melalui pemilu-pemilu sebelumnya.¹⁰ Ini terlihat pada Pilgub 2005 dengan perolehan 64,26 %, pada Pilgub 2010 dengan perolehan 63,62 % dan Pilgub 2015 dengan perolehan 58,65 %. (Terlampir)

Tabel:1.2
Persentasi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu legislatif
1955-2014



Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum (2014)

Pada empat periode pemilu terakhir jumlah daftar pemilih terus mengalami peningkatan dari 116,3 juta (1999), 124,5 juta (2004), 176,4 juta (2009) dan 186 juta (2014). Berdasarkan komposisi jenis kelamin, pada Pemilu

¹⁰Junaidi, Partisipasi Politik Masyarakat Sumatera Barat Pada Pemilu Dan Pilkada, *Integralistik* No.1/Th. XXII/2011, Januari-Juni 2011

Tahun 1999 jumlah pemilih perempuan sebanyak 66,3 juta (57%) dan laki-laki 50,0 juta (43%), Tahun 2004 pemilih perempuan sebanyak 66,0 juta (53%) dan laki-laki 58,5 juta (47%), Tahun 2009 pemilih perempuan 87,9 juta (48,8%) dan laki-laki 88,6 juta (50,2%), dan Pemilu 2014 sebanyak 93,1 juta (59,92%) dan laki-laki 93,4 juta (50,02%). Berdasarkan sebaran daftar pemilih, pada Pemilu 2014 mayoritas berada di Pulau Jawa dengan jumlah 100.197.346 daftar pemilih atau sekitar 53% dari total DPT. Walaupun peningkatan jumlah pemilih terus terjadi pada saat pemilu, namun partisipasi masyarakat justru terjadi penurunan, dan paling rendah pada tahun 2009.¹¹

Kecendrungan masyarakat tidak terlibat dalam pemilihan, karena rasa kekecewaan mereka terhadap pemilihan yang sebelumnya yang mengantarkan orang yang dipilih masyarakat tersebut terpilih, namun lupa akan janjinya sebagai wakil rakyat yang dipilih dengan berbagai hal merusak nama baik mereka.

McClosky berpendapat bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi orang yang tidak ikut dalam pemilihan yaitu;

- a. Bersikap tidak tertarik oleh, acuh tak acuh, dan kurang paham mengenai masalah politik.
- b. Disebabkan karena untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah tidak yakin bahwa usaha yang dilakukan tidak akan berhasil.
- c. Sengaja tidak memanfaatkan kesempatan memilih karena kebetulan berada dalam lingkungan dimana ketidaksetaraan merupakan hal yang terpuji.¹²

Adapun faktor-faktor kehadiran orang untuk pergi memilih dipengaruhi oleh figur calon, etnisitas/kekerabatan dan politik uang. Kemudian penyebab

¹¹ Lihat BPS, Statistik politik 2016.

¹² Budiardjo, op.cit ., hlm. 5

masyarakat enggan untuk melakukan pemilihan yaitu: karena faktor ideologi, masyarakat tidak percaya dengan partai politik, tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tidak percaya bahwa pemilu akan membawa perubahan kearah perbaikan, masih adanya stigma politik itu kotor, jahat, menghalalkan segala cara dan lainnya sebagai memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap politik. Kemudian masalah praktik pemilihan atau faktor teknis, karena jadwal pemilihan yang bertepatan dengan hari kerja masyarakat, sedang berada di luar kota atau jauh dari tempat pemilihan, dan belum lagi masalah internal partai politik.¹³

Dari berbagai faktor tersebut yang menjadi hal menarik dalam penelitian ini adalah pengaruh tingkat kepercayaan masyarakat pada partai politik terhadap partisipasi politik dalam pemilihan dengan adanya variabel korupsi, kinerja partai, dan tidak menepati janji yang tidak ditemukan oleh peneliti dalam penelitian lain. Dalam hal ini masyarakat di Kecamatan Bungus dan Kecamatan Kuranji sudah cerdas dalam memilih, sehingga di Kecamatan Bungus, pemilih termasuk dalam kategori pemilih yang rasional yang mana mereka akan memilih ketika partai atau calon dari partai tersebut dapat memenuhi kebutuhan ekonominya atau dapat membantu ekonominya ketika memilih orang yang menurutnya akan melakukan perubahan terhadapnya dan masyarakat. Begitupun di Kecamatan Kuranji, masyarakat sudah rasional dalam menentukan pilihannya, namun hanya sebagian masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pemilu atas kesadaran dirinya sendiri. Sehingga hal ini jika dilihat dari hasil perolehan suara tahun 2014 masih adanya masyarakat yang tidak ikut partisipasi dalam memberikan suara yang

¹³ Nurhasim, Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2014: Studi Penjajakan, Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2014

mana disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap partai politik atau calon pada pemilu sebelumnya.

Pada saat pemilu, partai politik melakukan perekrutan anggota dan kader partai untuk dapat mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, namun setelah terpilih banyak wakil rakyat yang menyalahgunakan jabatan yang membuat mereka terlibat kasus korupsi. Padahal masyarakat menginginkan kehidupan ekonominya terpenuhi dengan memilih partai atau calon yang mereka pilih tersebut, tetapi justru membuat masyarakat kecewa dengan apa yang mereka pilih tersebut sehingga menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat pada pemilu selanjutnya, mereka tidak ingin lagi berpartisipasi yang kemudian partisipasi masyarakat terus menurun dari waktu ke waktu. Penurunan tersebut bisa disebabkan karena mayoritas responden menilai bahwa fungsi intermediasi partai melemah, disebabkan merebaknya kasus korupsi politik, masalah moralitas elit partai, rencana pembangunan gedung baru DPR, studi banding dan kasus kasus lainnya yang membuat publik semakin jauh dengan partai.¹⁴

Berdasarkan data tentang partisipasi masyarakat sebelumnya, peneliti ingin meneliti pengaruh tingkat kepercayaan masyarakat pada partai politik terhadap partisipasi politik dalam pemilihan umum legislatif 2014. Dari perolehan suara tersebut peneliti ingin membandingkan dua kecamatan pada pemilihan umum legislatif 2014 di Kota Padang. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian komparatif yaitu penelitian yang membandingkan situasi paralel yang berbeda, dengan dilakukannya penelitian di waktu yang sama dengan tempat yang berbeda untuk diperbandingkan. Dalam penelitian ini yaitu pada waktu pemilihan umum

¹⁴ Burhanuddin Muhtadi, Perang Bintang 2014, Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2013, hlm.114.

legislatif 2014 Kota Padang dengan tempat yang berbeda yaitu Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Kecamatan Kuranji Kota Padang. Dalam penelitian ini terlihat bahwa terdapat kecamatan yang memperoleh suara tertinggi dan terendah, yaitu Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Kecamatan Padang Timur, namun peneliti memilih suara terendah di Kecamatan Kuranji yang memperoleh suara terendah kedua, karena dilihat dari jumlah pemilih yang ada di Kecamatan Kuranji tergolong banyak dibandingkan di Kecamatan Padang Timur, selanjutnya peneliti memilih Kecamatan Bungus Teluk Kabung karena memperoleh suara tertinggi dengan pemilih paling sedikit. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh tingkat kepercayaan masyarakat pada partai politik terhadap partisipasi politik di Kecamatan Bungus dan Kecamatan Kuranji Kota Padang .

Berdasarkan data perolehan suara pada pemilu legislatif tahun 2014 Kota Padang, menurut peneliti penelitian ini penting untuk dilakukan karena dalam penelitian akan mengungkapkan bagaimana pengaruh tingkat kepercayaan masyarakat pada partai politik terhadap partisipasi politik pada pemilu legislatif Kota Padang tahun 2014. Kemudian peneliti berasumsi, bahwa tingkat kepercayaan masyarakat pada partai politik di Kecamatan Bungus Teluk Kabung lebih tinggi dari pada Kecamatan Kuranji, jika dilihat dari hasil perolehan suara pada pemilu legislatif Kota Padang. Hal ini disebabkan kekecewaan masyarakat terhadap wakil rakyat, ketika masyarakat tidak percaya dengan partai politik ataupun wakil rakyat, maka masyarakat tidak akan ikut berpartisipasi dalam pemilu. Berdasarkan pengamatan peneliti melihat banyak wakil rakyat dari partai politik yang terjerat kasus seperti kasus korupsi. Sebaliknya ketika masyarakat percaya dengan partai politik, masyarakat akan ikut berpartisipasi serta akan

memilih calon dari partai yang menurutnya dapat melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Berikut nama-nama partai politik dan perolehan suara sah di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Kecamatan Kuranji.

Tabel 1.3
Perolehan Suara Sah Masing-Masing Partai Politik Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 Kota Padang

No	Partai Politik	Kecamatan Bungus	Kecamatan Kuranji
1	NASDEM	208	4214
2	PKB	1441	5184
3	PKS	350	6954
4	PDIP	552	3154
5	GOLKAR	442	6303
6	GERINDRA	1465	6320
7	DEMOKRAT	1718	4785
8	PAN	1930	4555
9	PPP	1055	3646
10	HANURA	483	4767
11	PBB	927	1652
12	PKPI	437	90
	Jumlah suara sah partai politik	11008	51624
	Persentase Suara	59,71%	49,68%

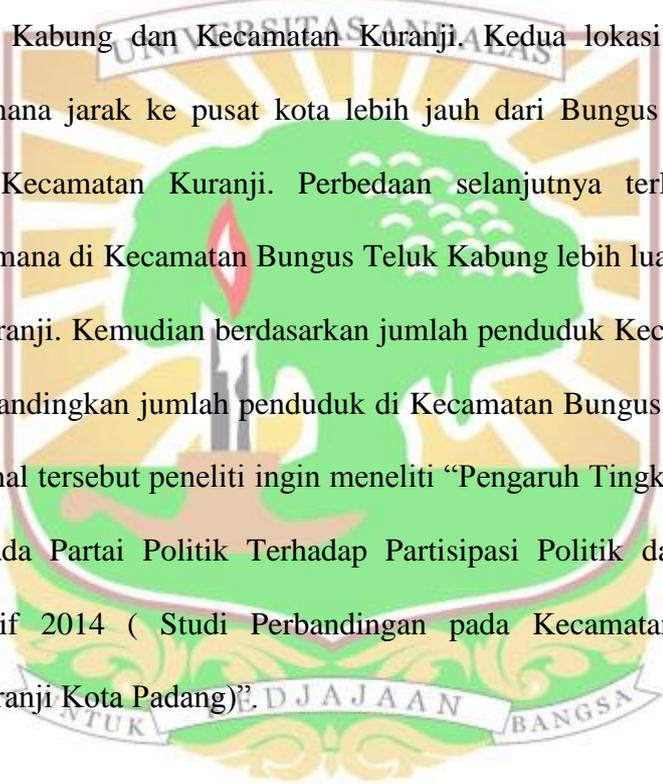
Sumber: *kpu.go.id*

Berdasarkan jumlah partai politik dan suara sah masing-masing partai politik di kedua kecamatan di atas, terlihat perolehan suara partai politik yang menjadi peserta pemilu 2014 Kota Padang dengan perolehan suara yaitu 59,71% di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan 49,68% di Kecamatan Kuranji. Berikut disertakan data perolehan suara seluruh partai politik pada pemilihan legislatif sebelumnya yaitu pada tahun 2004 dan 2009 di Kota Padang. *(Terlampir)*

Tabel 1.4
Perbedaan Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan Kecamatan Kuranji

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan	Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Padang	Luas wilayah
Bungus Teluk Kabung	24.672	245	33 km	100,78 km ²
Kuranji	144.063	2.509	9 km	57,41 km ²

Sumber : BPS Kota Padang 2016

Berdasarkan data di atas, penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Kecamatan Kuranji. Kedua lokasi ini memiliki perbedaan, dimana jarak ke pusat kota lebih jauh dari Bungus Teluk Kabung dibandingkan Kecamatan Kuranji. Perbedaan selanjutnya terlihat dari luas wilayah, yang mana di Kecamatan Bungus Teluk Kabung lebih luas dibandingkan Kecamatan Kuranji. Kemudian berdasarkan jumlah penduduk Kecamatan Kuranji lebih padat dibandingkan jumlah penduduk di Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Sehingga dari hal tersebut peneliti ingin meneliti “Pengaruh Tingkat Kepercayaan Masyarakat Pada Partai Politik Terhadap Partisipasi Politik dalam pemilihan umum legislatif 2014 (Studi Perbandingan pada Kecamatan Bungus dan Kecamatan Kuranji Kota Padang)”. 

B. Rumusan Masalah

Masalah dari penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pengaruh tingkat kepercayaan masyarakat pada partai politik terhadap partisipasi politik di Kecamatan Bungus pada pemilihan umum legislatif Kota Padang tahun 2014?

2. Bagaimana pengaruh tingkat kepercayaan masyarakat pada partai politik terhadap partisipasi politik di Kecamatan Kuranji pada pemilihan umum legislatif Kota Padang tahun 2014?
3. Bagaimana perbandingan pengaruh tingkat kepercayaan masyarakat pada partai politik terhadap partisipasi politik di Kecamatan Bungus dan Kecamatan Kuranji pada pemilihan umum legislatif Kota Padang tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan pengaruh tingkat kepercayaan masyarakat pada partai politik terhadap partisipasi politik di Kecamatan Bungus pada pemilihan umum legislatif Kota Padang tahun 2014
2. Menjelaskan pengaruh tingkat kepercayaan masyarakat pada partai politik terhadap partisipasi politik di Kecamatan Kuranji pada pemilihan umum legislatif Kota Padang tahun 2014
3. Menjelaskan perbandingan pengaruh tingkat kepercayaan masyarakat pada partai politik terhadap partisipasi politik di Kecamatan Bungus dan Kecamatan Kuranji pada pemilihan umum legislatif Kota Padang tahun 2014

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis menjadi sumber referensi dalam menambah pengetahuan dan bahan acuan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang. Serta dapat berguna dalam pengembangan bidang akademik bagi mahasiswa ilmu politik terhadap perkembangan konsep ilmu khususnya tentang tingkat kepercayaan.
- b. Secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna dan masukan bagi partai politik untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai dan politisi dengan membuktikan janji-janji yang diberikan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan.

